

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI PASAR BERAS (OPB) DI SURABAYA

Studi Deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Operasi Pasar Beras

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) Sub Divisi Regional

Surabaya Utara

CAHYANI NADYA FITRIANI

Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si

KKB KK 2 Fis AN 49 /11 Fit i

ABSTRAK

Kebijakan Publik dipandang sebagai suatu solusi dalam memecahkan permasalahan public tidak terkecuali permasalahan dalam menjaga kestabilan harga pangan khususnya beras.

Sebagaimana siklus tahunan, pada Desember-Januari harga beras pasti naik, kadang sangat signifikan karena volume suplai yang berkurang. Musim panen beras diperkirakan baru mulai bulan Maret karena hujan agak terlambat sehingga waktu tanam pun terlambat. Pemerintah pasti paham betul siklus tahunan ini sehingga keseimbangan penawaran dan permintaan beras di seluruh Indonesia sangat ditentukan oleh pengelolaan stok beras. Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan telah memberi mandat kepada segenap instansi pusat dan daerah melalui Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menetapkan kebijakan stabilisasi harga beras domestik. Ketika harga beras dunia amat liar pada 2008 dan 2009, Indonesia mampu meredam kenaikan harga beras di dalam negeri karena "keberhasilan" Bulog mengelola stok beras domestik, kekuatan jaringan Bulog dengan pedagang swasta, dan faktor dukungan produksi padi yang memadai. Tindakan spekulasi dan penimbunan beras dapat dihindari karena harga di pasar internasional sangat tinggi. Apabila pada musim tanam (paceklik) tahun ini pemerintah dan Bulog mampu melakukan minimal sama dengan 2009, kenaikan harga yang lebih tinggi pasti dapat dihindari. Kini situasi berbeda. Dulu pemerintah punya kewibawaan terhadap pasar, kini kuasa pasar menyingkirkan peran pemerintah. Tapi itu pilihan pemerintah sendiri. Pemerintah pasca Orde Baru secara konsisten memilih liberalisasi pertanian adalah cara terbaik. Pasar bebas di terapkan, bea masuk diturunkan, subsidi petani satu persatu dilucuti, sampai instrumen pengendali harga seperti Bulog diubah menjadi perusahaan pedagang pangan. Intervensi pemerintah untuk stabilisasi harga pangan menjadi tidak efektif lagi. Kebijakan Operasi Pasar Beras (OPB) yang semula diinginkan untuk bisa meredam gejolak harga beras dipasaran pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan keinginan karena pada prosesnya masih

memiliki banyak kendala seperti yang terjadi di Surabaya. Sehingga penelitian mengenai implementasi sebuah kebijakan dalam hal pangan di Indonesia menjadi kajian yang menarik untuk dibahas mengingat pada setiap negara tidak dapat dipisahkan dari persoalan pangan untuk masyarakatnya.

Kata kunci: - implementasi, kebijakan publik, OPB



ABSTRACT

Public policy is seen as a solution in solving public problems are no exception problems in maintaining price stability of food, especially rice. As the annual cycle, in December-January rice prices would rise, sometimes very significant because of the reduced volume of supply. New rice harvest is expected to begin in March due to rain a little late so the time of planting too late. The government certainly well aware of this annual cycle so that the balance of supply and demand of rice in Indonesia is very much determined by the management of rice stocks. Presidential Directive No. 7 of 2009 on rice policy has given the mandate to all central and local agencies through the Office of the Coordinating Minister for Economic Affairs to establish the domestic rice price stabilization policy. When world rice price is very wild in 2008 and 2009, Indonesia is able to absorb the increase in domestic rice prices because of "success" Bulog manage domestic rice stocks, the strength of Bulog network with private traders, and the factor of adequate support for rice production.

Action speculation and hoarding of rice can be avoided because the price in international market is very high. When the planting season (famine) years, the government and Bulog able to perform at least equal to 2009, higher prices must be avoided. Now the situation is different. Previously the government had authority to markets, market power now to get rid of the role of government. But that option the government itself. After the New Order government has consistently chose agricultural liberalization is the best way. The free market be applied, reduced import duties, subsidies farmers one by one stripped away, until the price control instruments such as Bulog converted into food trader company. Government intervention to stabilize food prices no longer effective. Policy of Rice Market Operation (OPB), which originally wanted to be able to reduce the fluctuation of rice prices in the market in fact does not run in accordance with the wishes because the process still has many obstacles as happened in Surabaya. So research on the implementation of a policy in terms of food in Indonesia to be an interesting study to be discussed because in each country can not be separated from the question of food for the community.

Key words: - implementation, public policy, Rice Market Operation